

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Aminuddin Ilmar. 2016. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenamedia Group.

Djaenal Hoesen Koesoemahatmadja. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.

Fenny Ambiyah. 2011. *Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Jum Anggraini. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Muchsan. 1981. *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Nomensen Sinamo. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Bumi Initama Sejahtera.

Philipus M. Hadjon, et. al. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gdjah Mada University Press.

Ridwan, HR. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1989.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Zainal Asikin dan Amirudin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Unndang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang  
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan  
Sipil.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2010 Tentang  
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Walikota Padang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Persyaratan  
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

### **C. INTERNET**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Negara\\_hukum.](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum)

<http://disdukcapil.depok.go.id/trend-pembuatan-akta-kelahiran-tahun-2013>

<http://e-journal.uajy.ac.id/1949/3/2MIH01522.pdf>

### **D. LAIN-LAIN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang  
Tahun 2014-2016.

Statistik Daerah Kota Padang 2016.